

MEMBANGUN ETIKA DAN MORALITAS UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER PENGAWAS PEMILU

Syarifah Farradina¹,
Winbaktianur², Prima Wahyu
Titisari³

¹ Fakultas Psikologi, Universitas
Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

² Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama, Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol, Padang, Indonesia

³ Fakultas Pertanian, Universitas
Islam Riau, Pekanbaru,
Indonesia.

Artikel

Diterima : 19 Juli 2022

Disetujui : 15 Agustus 2022

Email : winbaktianur@uinib.ac.id

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ini adalah peserta SKPP memperoleh pengetahuan terkait dengan kepengawasan partisipatif pemilu, mengetahui karakter moralitas dan etika yang dapat membangun integritas sebagai pengawas pemilu, serta mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi moralitas dan etika sebagai pengawas partisipatif pemilu.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, dengan lokasi pelaksanaan di Pekanbaru Propinsi Riau. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah, (1) Peserta SKPP memperoleh pengetahuan terkait dengan kepengawasan partisipatif pemilu. (2) mengetahui karakter moralitas dan etika yang dapat membangun integritas sebagai pengawas pemilu. (3) mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi moralitas dan etika sebagai pengawas partisipatif pemilu.

Kata kunci: partisipatif pemilu, integritas, karakter moralitas, etika.

Abstract

The purpose of this community service activity at the Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) is that SKPP participants gain knowledge related to participatory election supervision, know the character of morality and ethics that can build integrity as election supervisors, also know and understand what factors can affect morality and ethics as participatory election supervisors.

This activity held on October 2021, in Pekanbaru, Riau Province. The results of this activity are, (1) SKPP participants gain knowledge related to participatory election supervision. (2) knowing the character of morality and ethics that can build integrity as an election supervisor. (3) knowing and understanding what factors can affect morality and ethics as participatory election supervisors.

Keywords: *participatory elections, integrity, morality character, ethics.*

PENDAHULUAN

Pengawasan pemilu memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan demokrasi melalui pendelegasian dan menanamkan kepercayaan kepada individu-individu yang peduli politik. Pengawasan yang dititik beratkan pada evaluasi dan koreksi terhadap pencapaian hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil yang ingin dicapai (Musfialdy, 2012). Penyelenggara dan pengawas pemilu memiliki hubungan yang erat dan bekerjasama saling berkesinambungan. Pengawas pemilu dari golongan masyarakat adalah salah satu mitra penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan fungsinya, sebagai bentuk dukungan dalam hal pemantau pemilu, relawan pemilu, forum warga, Saka Adhyatsa, dan organisasi masyarakat, serta dari kalangan perguruan tinggi (Saufi, Faiz, & Yanuar, 2020). Penglibatan kalangan masyarakat dalam pengawasan merupakan salah satu kewajiban Bawaslu dalam menjalankan fungsi kelembagaan dengan memberikan hak warga negara untuk mengontrol dan mengawasi proses pemilu (Sholohah, Baius, & Rosyidin, 2018).

Pendidikan pengawasan ke pemilu penting dilakukan agar dapat mewujudkan pemilu yang demokratis, terhindar dari kecurangan, dan menempatkan hak-hak sipil dan politik warga negara (Rahadhanil & Junaidi, 2015). Pendidikan bagi partisipatif pengawas pemilu diberikan kepada berbagai kalangan masyarakat secara terprogram dan dijalankan dengan kurikulum agar menghasilkan partisipatif pengawas yang berintegritas. Partisipatif pengawas berkarakter yang memegang teguh etika dan moral adalah salah satu syarat yang dimiliki. Pendidikan karakter yang diperoleh dari salah satu kegiatan partisipatif pengawas pemilu adalah bagian dari usaha meningkatkan kesadaran akan mendidik dan membangun potensi peserta didik partisipatif (Annur, Yuriska, & Arditasari, 2021). Pendidikan karakter berarti membantu membangun moral dan etika yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial sehingga individu cenderung melakukan perilaku yang beradab.

Pendidikan karakter pada dasarnya diberikan mulai dari pendidikan level Pendidikan Usia Dini sampai kepada Perguruan Tinggi, dalam hal ini tidak terlepas pula diberikan kepada pengawas partisipatif pemilu untuk wilayah provinsi Riau. Serangkaian kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) se-Provinsi Riau menurut anggota Bawaslu Riau, salah satu kegiatannya adalah dengan memberikan pendidikan karakter bagi kader SKPP untuk provinsi Riau. Tujuan dari kegiatan SKPP sendiri adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses pemilu, sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat, sebagai pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada secara berkesinambungan, dan menciptakan tokoh-tokoh pengawas dan kader penggerak pengawasan, khususnya di provinsi Riau.

Menanamkan karakter baik bagi kader SKPP di Provinsi Riau berarti ikut membangun bangsa yang bermoral dan beretika dalam mengawasi pemilu di provinsi Riau. Penanaman karakter beretika dan bermoral tentu menambah perekat kesadaran diri yang tercermin dalam sikap dan tindakannya sebagai kader pengawas pemilu yang berintegritas. Penanaman karakter yang beretika dan bermoral pada

pengawas partisipatif tidak terlepas dengan meninjau karakteristik psikologisnya. Hal ini perlu dilakukan karena pentingnya faktor subjektif dalam menggambarkan ciri-ciri peserta SKPP ketika diberikan penugasan melaksanakan pengawasan jalannya pemilu. Menurut Uzdenova (2019) faktor psikologis berperan dalam menilai ciri individu dan strategi dalam memecahkan masalah, ini juga terkait dengan efektifitas dan efisiensi kerja. Pentingnya menilai karakteristik psikologis agar dapat mengetahui sejauhmana pengetahuan individu tentang diri dan lingkungannya, sehingga dapat melakukan pemecahan masalah.

Pentingnya moralitas dan etika karena menentukan perilaku dan tindakan individu dalam mengambil keputusan dalam keadaan apapun. Perilaku moral menunjukkan individu memiliki kode moral kelompok sosial yang dikendalikan oleh konsep-konsep moral individu. Pemilu tanpa pengawasan yang memiliki karakter bermoral dan beretika akan menunjukkan terjadinya manipulasi suara, hilangnya hak pilih, terjadinya politik uang, pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil. Hal-hal tersebut terjadi tidak terlepas dari segala kerugian besar bagi negara dan masyarakat oleh karena biaya politik yang mahal, kemungkinan besar terjadinya pemungutan suara ulang, dan konflik antar pendukung calon.

KAJIAN TEORI

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan kegiatan resmi dari Bawaslu RI yang telah digagas semenjak 2018, yang kemudian diturunkan Bawaslu Riau dan menugaskan Pokja SKPP Bawaslu Riau. SKPP bertujuan menyebarkan dan mendorong semangat dan inisiatif masyarakat dalam mengawal agenda demokrasi teknis pengawasan pemilu bagi generasi muda (Utantoro, 2021). Pengawas partisipatif adalah bagian dari strategi dari Bawaslu untuk mengatasi berbagai masalah terkait dengan luasnya cakupan sumber daya manusia yang melakukan pengawasan di suatu wilayah (Silaban, 2014). Pada mulanya Bawaslu membuat langkah konkrit dengan membangun Gerakan Pengawas Partisipatif (Gempar) untuk membantu melakukan perbaikan dan pengontrolan sosial masyarakat dalam pengawasan pemilu (Pradana, 2019). Pengawas partisipatif diinisiasi sejak awal untuk mengawasi terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan serta menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu dan masyarakat.

Berbagai dukungan kepada Bawaslu untuk melaksanakan SKPP dengan melibatkan kalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di provinsi Riau. Pelaksanaan kegiatan diberbagai provinsi di Indonesia memiliki tujuan yang sama untuk mendeskripsikan proses pembelajaran dari awal kegiatan SKPP ini yaitu (1) Untuk menjelaskan pola pembelajaran dan target waktu, serta tahapan penyelesaian pembelajaran; (2) Untuk mengukur indikator capaian keberhasilan proses pembelajaran SKPP; (3) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses pembelajaran yang dijalankan (Saufi et al, 2020).

Penanaman karakter yang beretika dan bermoral pada pengawas partisipatif tidak terlepas dari meninjau karakteristik psikologisnya. Hal ini perlu dilakukan karena pentingnya faktor subjektif dalam

menggambarkan ciri-ciri peserta SKPP ketika memberikan penugasan melaksanakan pengawasan jalannya pemilu. Menurut Uzdenova (2019) faktor psikologis berperan dalam menilai ciri individu dan strategi dalam memecahkan masalah, ini juga terkait dengan efektifitas dan efisiensi kerja. Pentingnya evaluasi tersebut agar dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan individu tentang diri dan lingkungannya, sehingga dapat melakukan pemecahan masalah. Pendidikan karakter yang menekankan pada moralitas dan etika, dengan demikian membangun upaya rasionalitas dalam menentukan sesuatu yang sejalan dengan norma sosial masyarakat.

Perkembangan moral berdasarkan teori belajar yang merupakan proses pembelajaran moral yang berisikan pandangannya terhadap model sosial, penghargaan, hukuman, dan pengkondisian klasik kecemasan (Sunar, 2002,p.3). Pembelajaran moral menurut pandangan beliau terjadi dan dilakukan sepanjang kehidupan dalam merespon segala perubahan baru. Adapun model perkembangan moral berbasis kognisi Kohlberg, disimpulkan oleh Sunar (2002, p.11) budaya yang melekat pada individu menunjukkan perbedaan yang mengedepankan otonomi, komunitas, dan keilahian. Peran moralitas dalam memelihara tatanan sosial termasuk dalam proses pengawasan pemilu didorong oleh berbagai perkembangan dan implikasi klinis yang terkait dengan penyimpangan. Berdasarkan perspektif teoritis tersebut maka perlu adanya dilakukan pengembangan karakter moralitas dan etika kepada setiap individu, terutama bagi kader pengawas partisipatif pemilu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut

- 1) Apakah SKPP yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan pengawas partisipatif pemilu?
- 2) Bagaimanakah pendidikan karakter moralitas dan etika dapat membangun integritas pengawas partisipatif?
- 3) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi moral dan etika?

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya salah satu kegiatan yang dilakukan dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ini adalah sebagai berikut:

- 1) Agar peserta SKPP memperoleh pengetahuan terkait dengan kepengawasan partisipatif pemilu
- 2) Agar peserta SKPP mengetahui karakter moralitas dan etika yang dapat membangun integritas sebagai pengawas pemilu
- 3) Agar peserta SKPP dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi moralitas dan etika sebagai pengawas partisipatif pemilu.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan menjalankan metode penyuluhan atau ceramah, dengan memberikan materi secara langsung kepada 35 orang Calon Kader Pengawas Partisipatif Pemilu yang telah diseleksi oleh Bawaslu Riau dalam program SKPP 2021 berdasarkan surat nomor 069/KA.02/K/10/2021. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh tim penyelenggara SKPP Bawaslu Riau pada tanggal 18 sd 22 Oktober 2021, di Hotel Aryaduta Pekanbaru, jalan Diponegoro no. 34, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau.

Salah satu dari rangkaian kegiatan SKPP yang dilaksanakan materi psikologi diperlukan untuk memenuhi syarat kegiatan tersebut yang diberikan dengan ceramah dan diskusi (tanya jawab) antara narasumber dan peserta. Kegiatan SKPP menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dan kemampuan kepemiluan baik secara langsung atau pun tidak. Salah satu dari pematery yang ditunjuk dari Bawaslu Riau adalah terkait dengan kepemiluan dan peran pengawas pemilu selama menjadi pengawas partisipatif. Materi lainnya adalah psikologis yang diberikan dalam kegiatan SKPP tingkat menengah di provinsi Riau ini berjudul **membangun etika dan moral dalam pengembangan karakter pengawas pemilu**. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan semenjak tanggal 18 Oktober 2021, yang diisi dengan serangkaian pengetahuan kepemiluan, peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang pengawas partisipatif pemilu, pada tanggal 20 Oktober 2021, selama 35 menit narasumber memberikan gambaran dan penjelasan terkait dengan topik tersebut dan kemudian selama 25 menit selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan yang ditaja oleh Bawaslu Riau kepada calon-calon SKPP dilakukan secara langsung ditempat dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan penugasan. Fokus materi psikologis yang diberikan dengan judul membangun etika dan moral dalam pengembangan karakter pengawas pemilu, tujuannya agar memahami faktor – faktor psikologis apa saja yang dapat mempengaruhi moralitas dan etika sebagai pengawas partisipatif pemilu. Materi psikologi mengenalkan perbedaan antara karakter dan sifat pada individu, hal ini perlu diberikan pengetahuan terkait dengan ciri penting dari karakter bawaan, diwariskan, tidak tertukar, dan dapat dibangun dalam setiap individu.

Materi psikologi ini pula menjelaskan kepada peserta SKPP perbedaan antara moral dan perilaku yang merupakan konsep dalam kehidupan sebagai pengawas partisipatif. Hal ini pula terkait dengan pandangan teoritis dari pendekatan psikologi perkembangan moral dari psikoanalisa dan behaviorsime (belajar). Materi ini menjelaskan tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg (Yilmaz, Bahcekapili, & Sevi, 2019). Berdasarkan dari analisis kebutuhan yang disampaikan oleh penyelenggara, perlu diberikan pula pengetahuan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari moral dan etika sebagai pengawas partisipatif pemilu kepada calon kader. Hal ini disebabkan adanya sifat dari manusia bertindak dengan mempertanyakan konsistensinya dalam memegang moral dan etika sebagai

partisipatif pemilu, menjelaskan dukungan sosial dan harmonisasi dengan lingkungan, memahami penghayatan dan pengalaman keyakinan, dan bagaimana penerapan norma berlaku.



Gambar 1. Bersama sebagian dari peserta SKPP tingkat menengah provinsi Riau

SKPP provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Bawaslu Riau merupakan bagian dari tindakan yang harus dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan keterbukaan *public* kepada masyarakat, sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemilu. Berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas sebagai pengawas partisipatif pemilu, kader dituntut untuk menyiapkan diri melakukan pemantauan dan mensosialisasikan potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu (Itun, 2019.p3).



Gambar 2. Bersama panitia penyelenggara Bawaslu Riau



Gambar 3. Memberikan materi membangun etika dan moral bagi pengawas partisipatif pemilu

Penting nya pengawasan dilakukan dalam penjelasan materi psikologi dalam kegiatan SKPP Riau ini adalah memastikan keterlindungan hak politik warga masyarakat, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik, mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat. Pengawasan dalam psikologi organisasi perlu menelaah terhadap penyimpangan/kekeliruan, refleksi sifat dari perencanaan,

memprediksi titik kelemahan, sifat organisasi yang tidak sempurna, melakukan pembimbingan dan pengubahbaikan.



Gambar 4. Materi etika dan karakter moral bagi pengawas partisipatif pemilu

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta SKPP memperoleh pengetahuan terkait dengan kepengawasan partisipatif pemilu. Materi pengetahuan ini diberikan oleh Bawaslu Riau.
2. Peserta SKPP mengetahui karakter moralitas dan etika yang dapat membangun integritas sebagai pengawas pemilu. Moralitas berkaitan dengan penalaran kognitif, sehingga individu menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dalam melakukan tugas dan menyelesaikannya. Kinerja yang baik tidak terlepas dari etika dalam tindakan dan pengambilan keputusan.
3. Peserta SKPP dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi moralitas dan etika sebagai pengawas partisipatif pemilu. Perilaku individu yang jujur, disiplin, hormat, taat, dan sikap yang dituntut oleh setiap individu, hal ini dipengaruhi oleh karakteristik yang dibawa dari lingkungan.

Saran

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, pembahasan, dan simpulan yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara kegiatan yaitu Bawaslu Riau, agar dapat memberikan pengetahuan kepemiluan yang lebih mengarah kepada penyelesaian konflik dan isu-isu terkait kepemiluan. Selain itu perlu diberikan materi psikologi yang lebih banyak, tidak hanya diberikan satu waktu saja karena mengenal karakter moral diri bagi seorang pengawas sangat penting, sehingga dapat lebih memahami karakter individu yang diawasi.
2. Bagi Peserta kegiatan SKPP agar dapat membangun diri berdasarkan moral dan etika yang berlaku sebagai pengawas partisipatif pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Y. F., Yuriska, R., & Arditasari, S. T. (2021). Pendidikan karakter dan etika dalam pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang*, 330-335
- Ellemers N, van der Toorn J, Paunov Y, van Leeuwen T. (2019). The psychology of morality: a review and analysis of empirical studies published from 1940 through 2017. *Personality and Social Psychology Review*. 2019;23(4):332-366.
- Itun, U. (2019). Pengawasan Pemilu partisipatif tahun 2019. Karya Ilmiah: badan Pengawasan Pemilihan Umum. Kabupaten pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme pengawas pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 9 (1), 41-58
- Pradana, J. (2019). Sepenggal perjalanan kewenangan Bawaslu. Diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-kewenangan-bawaslu>
- Ramadhanil, F., & Junaidi, V. (2015). Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. *Kemitraan bagi Pemabruan Tata Pemerintahan*.
- Saufi, A., Faiz, A., Yanuar, M. R. (2020). Sekolah kader pengawa partisipatif daring sebagai sarana pendidikan
- Silaban, F. (2014). Bawaslu akan bangun pusat pendidikan pengawsan partisipatif. Dapat diakses <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3 (1), 14-18
- Sunar, Diane. (2002). Psychology of Morality. *Online Readings in Psychology and Culture*. 2. 10.9707/2307-0919.1012
- Utantoro, A. (2021). Bawaslu RI buka sekolah kader pengawas partisipatif. Diterbitkan Kamis, 23 September 2021. Diakses 29 Juni 2022.
- Uzdenova, A. (2019). Individual psychological characteristic of personality as correlates of executive activity of university students. *SHS Web of Conference*, 70 (1), 70. 10.1051/shsconf/20197007007
- Yılmaz, O., Bahçekapılı, H., & Sevi, B. (2019). Theory of Moral Development. 10.1007/978-3-319-16999-6_171-1.